



**MEDIKOLEGAL KEBUTUHAN PENGADAAN RUANG LAKTASI DI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Studi di Kota Semarang)**

JURNAL MEDIA MEDIKA MUDA

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan
guna mencapai gelar sarjana strata-1 pendidikan dokter**

**MUHAMMAD RIO NARDO
22010110120128**

**PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2014**

LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENELITIAN
MEDIKOLEGAL KEBUTUHAN PENGADAAN RUANG LAKTASI DI
BADAN USAHA MILIK NEGARA
(Studi di Kota Semarang)

Disusun oleh
MUHAMMAD RIO NARDO
22010110120128

Telah disetujui
Semarang, 18 Juli 2013

Pembimbing I



dr. dr. Gatot Suharto, SH, Sp.F,
DFM, Mkes.
NIP. 195202201986031001

Pembimbing II



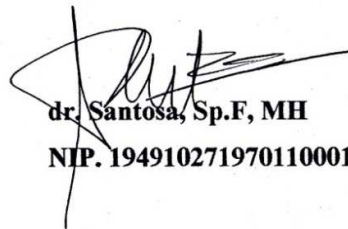
dr. Dodik Pramono, M.Si.Med
NIP. 196804271996031003

Ketua Penguji



dr. Achmad Zulfa Juniarto, Sp.And,
M.Si.Med, Ph.D.
NIP. 197006081997021001

Penguji



dr. Santosa, Sp.F, MH
NIP. 194910271970110001

**Medikolegal Kebutuhan Pengadaan Ruang Laktasi di Badan Usaha Milik Negara
(Studi di Kota Semarang)**

ABSTRAK

Latar Belakang : Salah satu hak yang dimiliki bayi adalah untuk mendapatkan air susu ibu (ASI) secara eksklusif. Namun di masa ini banyak sekali bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif dikarenakan berbagai macam hal, seperti tingginya aktivitas ibu dikantor, kurang memadainya fasilitas pendukung program ASI eksklusif, kurangnya pengetahuan ibu akan pentingnya ASI eksklusif dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pemerintah akhirnya melalui PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 turut serta dalam menegakkan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif.

Tujuan : Melalui penelitian ini, akan diketahui tentang pelaksanaan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Ruang Laktasi guna mendukung program ASI eksklusif.

Metode : Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode *cross-sectional*. Subyek penelitian adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang berada di wiliayah Kota Semarang dan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin BUMN serta karyawan wanita di BUMN tersebut yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian dilaksanakan selama 5 bulan mulai bulan Maret 2014 sampai bulan Juli 2014. Besar sampel minimal untuk BUMN dan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin BUMN adalah sebanyak 15, sedangkan besar sampel minimal untuk karyawan wanita di BUMN adalah sebanyak 24. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Hierarchy Sampling*. Cara pengumpulan data adalah dengan penilaian secara langsung oleh peneliti dengan mengisi *form* penilaian dan melalui pengisian kuesioner (*assisted delivery questionnaires*). Analisis data meliputi deskriptif dan uji hipotesis. Uji yang digunakan pada penelitian ini adalah *Chi- Square Test*.

Hasil penelitian: 83,3% BUMN tidak memiliki ruang laktasi, 16,7% BUMN memiliki ruang laktasi dengan fasilitas yang kurang memadai, dan 0% BUMN memiliki ruang laktasi dengan fasilitas yang memadai.

Kesimpulan: Mayoritas BUMN di wilayah Kota Semarang belum memiliki ruang laktasi sesuai dengan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013.

Kata kunci: Ruang laktasi, PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013

**Medico Legal Procurement Needs for Lactation Rooms in State-Owned Enterprises
(A Study Case in Semarang)**

ABSTRACT

Background: One of the rights owned by baby is to get milk (breastfeeding), exclusively. But nowadays, there are a lot of babies who do not get exclusive breastfeeding because of variety reasons, such as highmother's activities at the office, the inadequate facilities to support exclusive breastfeeding programs, mother's lack of knowledge of the importance of exclusive breastfeeding and so forth. Therefore, government finally participated in enforcing the babies' rights for exclusive breastfeeding through the Regulation No.33 of 2012 and PERMENKES No.15 in 2013.

Aim: Through this research, the implementation of Indonesian Government Regulation No. 33 of 2012 and PERMENKES of the Republic of Indonesia No.15 in 2013 regarding lactation rooms to support exclusive breast feeding program will be known.

Methods: This study is an observational analytic with cross-sectional method. The study subjects were State-Owned Enterprises (SOEs) which are in Semarang and SOE leaders or the person designated by the SOE leader and female employees in the SOE who met the inclusion criteria. The research was conducted for 5 months starting on March 2014 until July 2014. Minimum sample size for SOE and SOE leaders or the person designated by the SOE leader are as many as 15, while the minimum sample size for female employees in SOEs are as many as 24. The sampling as conducted by using Hierarchy Sampling technique. The data collected is directly rated by the researcher to fill the assessment or mand through questionnaires (assisted delivery questionnaires). Data analysis included descriptive and hypothesis testing. Test used in this study was Chi-Square Test.

Result: 83.3% of state-owned enterprises did not have a lactation room, 16.7% of state-owned companies had lactation rooms with not adequate facilities, and 0% of state-owned companies had lactation rooms with adequate facilities.

Conclusion: The majority of SOEs in Semarang did not have a lactation room in accordance with Indonesian Government Regulation No. 33 of 2012 and PERMENKES of the Republic of Indonesia No.15 in 2013.

Keywords: Lactation rooms, Indonesian Government Regulation No. 33 of 2012 and PERMENKES of the Republic of Indonesia No.15 in 2013, State-Owned Enterprises (SOEs).

PENDAHULUAN

Air susu ibu (ASI) merupakan air susu yang berasal dari payudara ibu. Di dalam ASI terkandung berbagai macam nutrisi lengkap dan seimbang yang hampir dapat memenuhi semua nutrisi yang dibutuhkan oleh bayi, baik nutrisi untuk perkembangan otak, tumbuh kembang bayi, hingga imunitas tubuh, dimana hal ini tidak ditemukan secara lengkap pada susu formula¹ Oleh karenanya, pemberian ASI secara eksklusif merupakan salah satu hal yang sangat penting, tidak hanya untuk bayi namun juga buat ibu.

Menurut World Health Organization (WHO), ASI eksklusif adalah pemberian ASI segera kepada bayi yang baru saja lahir hingga berumur enam bulan tanpa disertai makanan atau minuman lain, kecuali untuk rehidrasi, pemberian vitamin tetes atau mineral, atau obat-obatan. WHO merekomendasikan pemberian ASI eksklusif selama enam bulan ini harus dijalankan secara optimal demi mendapat pertumbuhan, perkembangan dan kesehatan bayi yang optimal.²

Menurut UNICEF berdasar pada Survei Demografi Indonesia, hanya sepertiga ibu yang menyusui bayinya secara eksklusif.³ Hal ini sungguh memprihatinkan, banyak anak yang dilanggar haknya, bahkan menjadi korban.

Hal ini dapat terjadi dikarenakan banyak hal, seperti kurang pengetahuannya ibu tentang ASI eksklusif, aktivitas ibu yang begitu padat terutama wanita karir yang cenderung lebih ingin bekerja dan tidak mau repot, kurang aktifnya peran tenaga kesehatan dalam melakukan edukasi terhadap pentingnya ASI eksklusif, hingga kurangnya fasilitas guna mendukung program ASI eksklusif. Oleh karenanya, melihat hal ini, pemerintah akhirnya melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 (yang selanjutnya disingkat PP RI Nomor 33 Tahun 2012) dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2013 (yang selanjutnya disingkat PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013) turut serta dalam menegakkan hak bayi untuk mendapatkan ASI eksklusif.^{4,5}

Didalam PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 terdapat pasal-pasal yang mengatur hak dan kewajiban tidak hanya hak bayi, kewajiban ibu, namun hingga hak dan kewajiban dari tenaga medis dan

masyarakat. Selain itu didalam peraturan pemerintah ini pula diatur sarana prasarana guna mendukung program ASI eksklusif ini, yang salah satunya adalah Ruang Laktasi.^{4,5} Di dalam PP RI Nomor 33 Tahun 2012 Bab V dikatakan bahwa, semua tempat kerja, termasuk badan usaha milik negara harus mendukung program ASI eksklusif, dengan menyediakan fasilitas khusus untuk menyusui dan atau memerah ASI, serta tempat kerja tersebut harus menyediakan peraturan internal yang mendukung pelaksanaan program ASI eksklusif.⁴

Di masa ini, jumlah wanita karir di Indonesia sangatlah banyak. Apa jadinya jika wanita karir tersebut memiliki bayi dan harus bekerja serta memberikan ASI untuk bayinya tanpa adanya fasilitas pendukung di tempat kerja. Oleh karenanya melalui penelitian ini, akan diketahui tentang pelaksanaan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 mengenai Ruang Laktasi guna mendukung program ASI eksklusif.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya ruang laktasi di badan usaha milik negara (BUMN) Kota Semarang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian observasional analitik dengan metode *cross-sectional* yaitu mencari hubungan antara variabel yang ada dan dipelajari pada saat yang sama. Sampel adalah pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin BUMN dan karyawan wanita di BUMN yang berada di wilayah Kota Semarang dan bersedia menjadi subyek penelitian. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Hierarchy Sampling*. Teknik ini dipilih karena dalam penelitian ini akan diambil dua data dari subjek sampel, yaitu pemimpin atau orang yang ditunjuk oleh pemimpin BUMN dan karyawan wanita yang bekerja di BUMN tersebut.

Sesuai dengan rancangan penelitian, untuk memperoleh besar sampel pada penelitian ini, maka akan digunakan perhitungan proporsi tunggal. Besar sampel BUMN dan pemimpin BUMN / orang yang ditunjuk adalah minimal 15 dengan standar deviasi untuk 1,96 dengan koefisien level 95%, $P = 0,50$, $Q = 0,5$ dan $d = 0,25$. Pada penelitian ini digunakan sampel 18 BUMN dan 18 pemimpin BUMN

atau orang yang ditunjuk. Sedangkan untuk menghitung besar sampel karyawan wanita, juga digunakan rumus dengan perhitungan proporsi tunggal. Namun, besar sampel minimal adalah 24 dengan rumus standar deviasi untuk 1,96 dengan koefisien level 95%, $P = 0,50$, $Q = 0,5$ dan $d = 0,25$. Pada penelitian ini besar sampel karyawan wanita yang digunakan adalah 33.

Variabel bebas pada penelitian ini adalah BUMN di wilayah Kota Semarang. Sedangkan variabel tergantung pada penelitian ini adalah aspek medikolegal tentang ruang laktasi. Cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan penilaian secara langsung oleh peneliti dengan mengisi form penilaian yang telah dibuat sebelumnya mengenai kantor BUMN dan melalui pengisian kuesioner (*assisted delivery questionnaires*) yang telah ditetapkan standarnya sesuai dengan validitas dan reabilitas penelitian serta *informed consent*. Cara pengukuran kuesioner ini dengan mengukur hasil penelitian berdasarkan skor tertentu. Setelah memperoleh data, maka akan dilakukan pemeriksaan kelengkapan dan kebenaran data. Kemudian data akan diberi kode, ditabulasi dan dimasukkan ke dalam sistem komputer.

Analisis data pada penelitian ini meliputi deskriptif dan uji hipotesis. Pada deskriptif data yang berskala nominal akan dinyatakan sebagai persentase. Uji yang digunakan pada penelitian ini menggunakan Chi-Square test. Analisis data akan dilakukan dengan program komputer.

HASIL PENELITIAN

Analisis Sampel

Sampel Pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk

Rentan usia pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk bervariasi mulai dari 23 tahun sampai 52 tahun.

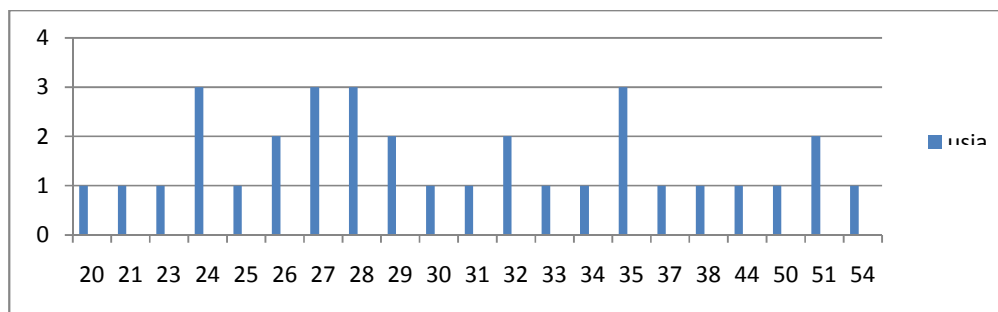
| | N | Persentase |
|------------|---|------------|
| Laki- laki | 8 | 44.4 |

| | | |
|-----------|----|-------|
| Perempuan | 10 | 55.6 |
| Total | 18 | 100.0 |

Tabel 1. Jenis kelamin pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk

Karyawan wanita

Rentan usia karyawan wanita mulai dari 20 sampai 54 tahun



Gambar 1. Usia karyawan wanita

Deskriptif

Hasil penelitian di BUMN didapatkan 0% memiliki ruang laktasi dengan fasilitas memadai, 16,7% memiliki ruang laktasi dengan fasilitas yang kurang memadai dan 83,3% tidak memiliki ruang laktasi. Sedangkan, tingkat pengetahuan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk adalah 16,7 % berpengetahuan rendah, 61,1% berpengetahuan sedang dan 22,2% berpengetahuan tinggi. Tingkat kebutuhan wanita karir yang bekerja di BUMN tersebut akan pentingnya ruang laktasi juga memiliki frekuensi masing-masing, yaitu 6,1% dengan tingkat kebutuhan rendah, 60,6% dengan tingkat kebutuhan sedang, dan 33,3% dengan tingkat kebutuhan tinggi.

Analisa Analitik

Tingkat kepatuhan dari suatu BUMN bisa dilihat dari hubungan antara tingkat pengetahuan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk dengan ada tidaknya ruang laktasi. Berdasar hasil penelitian didapatkan nilai $p > 0,05$ berarti

tidak terdapat hubungan bermakna antara variabel tingkat pengetahuan dengan ada tidaknya ruang laktasi. Namun, disisi lain, dari hasil penelitian juga didapat angka 66,7% BUMN yang patuh, 11,1% BUMN yang tidak patuh, dan 22,2% BUMN yang tidak tahu. Persentase BUMN yang patuh didapat melalui perbandingan antara jumlah BUMN dengan tingkat pengetahuan sedang hingga tinggi dengan adanya ruang laktasi. Persentase tidak patuh didapat dari perbandingan antara jumlah BUMN dengan tingkat pengetahuan sedang hingga tinggi dengan tidak adanya ruang laktasi di BUMN tersebut. Sedangkan persentase tidak tahu di dapat dari perbandingan antara jumlah BUMN dengan tingkat pengetahuan rendah dengan ada atau tidaknya ruang laktasi.

PEMBAHASAN

Ada tidaknya ruang laktasi

Mayoritas BUMN yang ada di Kota Semarang tidak memiliki ruang laktasi. Mayoritas BUMN tersebut merasa bahwa ruang laktasi merupakan ruang yang tidak efektif dan efisien karena penggunaan maupun peranan pentingnya tidak banyak digunakan di kantor. Kebanyakan dari BUMN tersebut lebih senang menggunakan ruang-ruang yang ada untuk ruang *meeting*, gudang, dan ruang-ruang lainnya dari pada harus dijadikan ruang laktasi.

Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan, juga terdapat BUMN yang memiliki ruang laktasi. Hanya saja, meskipun ruang laktasi tersedia di kantor tersebut, sarana prasarana dari ruang laktasi seperti yang disebutkan dalam PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 belum terpenuhi. Banyak dari ruang laktasi tersebut yang sarana prasarananya masih jauh dari yang seharusnya. Kebanyakan dari ruang laktasi itu hanya menyediakan ruang tertutup dengan fasilitas tambahan *Air Conditioner* (AC) dan meja kursi saja. Sedangkan fasilitas lain seperti wastafel, *cooler bag*, dan alat-alat pendukung ASI lainnya belum tersedia. Padahal alat-alat yang tidak tersedia justru merupakan alat-alat yang sangat penting untuk mendukung program asi eksklusif.

Tingkat pengetahuan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk

Tingkat pengetahuan ini didapat dari hasil menjawab kuesioner yang dilakukan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk. Bila dilihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat 83,3% pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk memiliki pengetahuan sedang hingga tinggi. Mayoritas dari mereka mengetahui akan ruang laktasi, namun tidak telalu dalam. Banyak dari mereka yang mengetahui tentang ruang laktasi dan adanya aturan mengenai kewajiban adanya ruang laktasi di BUMN, namun kebanyakan dari mereka tidak mengetahui aturan tersebut tertuang pada PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013.

Disisi lain, 16,7% pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk memiliki tingkat pengetahuan rendah. Selain tidak mengetahui tentang ruang laktasi, mereka juga tidak mengetahui tentang PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013.

Tingkat kebutuhan wanita karir

Dari hasil penelitian didapatkan mayoritas wanita karir di BUMN membutuhkan ruang laktasi. Selain digunakan untuk memberikan ASI, ruang laktasi juga sangat dibutuhkan bagi mereka untuk memerah ASI. Sampai-sampai, karena mayoritas BUMN di Semarang tidak memiliki ruang laktasi, mereka harus memerah ASI di kamar mandi, gudang kantor, maupun ruang kerja dimana ruang-ruang tersebut tidak memiliki fasilitas maupun standar yang sesuai dengan aturan ruang untuk memerah ASI.

Ada beberapa BUMN yang menyediakan aturan bagi karyawan wanita yang menyusui sebagai ganti dari ruang laktasi. Seperti aturan yang mengijinkan mereka untuk pulang ketika jam istirahat hingga ada yang diperbolehkan pindah kantor cabang yang dekat rumah untuk mempermudah mereka pulang ketika ingin memberikan ASI kepada anak mereka. Namun, aturan ini tetap tidak begitu efektif dari pada ruang laktasi guna mendukung mereka dalam memberikan ASI eksklusif. Ditambah, ada juga aturan BUMN yang justru memperberat pemberian ASI eksklusif pada wanita karir, seperti aturan cuti melahirkan hanya diberikan

selama 3 bulan dengan perincian 1 bulan sebelum melahirkan dan 2 bulan setelah melahirkan. Bila dilihat dari aturan pemberiann ASI eksklusif masih ada 4 bulan lagi dimana seharusnya seorang ibu tetap fokus dalam pemberian ASI kepada bayi. Selain itu ada juga aturan yang melarang seorang ibu wanita karir membawa bayi mereka ke kantor. Aturan-aturan inilah yang menambah berat seorang wanita karir dalam memenuhi kewajiban mereka sebagai seorang ibu dalam memberikan ASI eksklusif.

Mayoritas wanita karir di BUMN sangat memprioritaskan tidak hanya anak mereka namun juga pekerjaan mereka. Terkadang ada beberapa subyek penelitian yang bahkan rela tidak memberikan ASI kepada anak mereka asal pekerjaan mereka tidak terganggu. Hal ini menunjukkan seberapa besar peranan penting adanya fasilitas pendukung program ASI eksklusif. Jika hal ini terus dibiarkan, seiring dengan meningkatnya angka wanita karir di Indonesia maka angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia akan terus menurun.

Tingkat kepatuhan

Dari hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan yang dinilai dari hubungan antara tingkat pengetahuan dan ada tidaknya ruang laktasi, didapatkan nilai $P > 0,05$ maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara tingkat pengetahuan dengan ada tidaknya ruang laktasi.

Namun, disisi lain dari angka korelasi yang didapat kita bisa melihat angka kepatuhan dari suatu BUMN. Kepatuhan dilihat dari tingkat pengetahuan dengan ada tidaknya ruang laktasi. Dari penelitian ini di dapat hanya 11,1% BUMN yang patuh terhadap PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 dari 18 BUMN yang menjadi subyek penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan adanya ruang laktasi di kantor BUMN mereka meskipun sarana prasarananya belum begitu memadai seperti yang ada di PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013. Namun hal ini sudah lebih baik karena mereka tahu akan aturan mengenai wajib diadakannya ruang laktasi di BUMN dan terdapat ruang laktasi di BUMN mereka.

Selain BUMN yang patuh, terdapat 66,7% BUMN yang tidak patuh terhadap PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013. Mereka mengetahui akan adanya aturan yang mewajibkan adanya ruang laktasi di BUMN mereka. Namun, mereka tidak menyediakannya dikarenakan berbagai macam alasan, salah satunya ada BUMN yang merasa ruang laktasi kurang bermanfaat dan efisien dalam penggunaannya. Mereka lebih suka menjadikan ruang tersebut untuk sarana ruang meeting, ruang tamu, dan lain sebagainya. Ditambah, ada beberapa BUMN yang beralasan juga bahwa terkadang dalam satu tahun belum pasti ada karyawan wanita yang melahirkan, jadi ruang tersebut cenderung tidak konsisten dalam penggunaannya. Oleh karena itu, BUMN-BUMN ini akhirnya memutuskan untuk meniadakan ruang laktasi di kantor mereka meskipun mereka tahu bahwa ada aturan mengenai kewajiban adanya ruang laktasi di BUMN mereka.

Hal lain yang memperkuat mereka untuk meniadakan ruang laktasi adalah karena tidak pernah adanya sanksi yang diberikan kepada mereka karena meniadakan ruang laktasi di kantor mereka.

Selain BUMN yang patuh dan tidak patuh, ada juga BUMN yang dalam penelitian ini dikategorikan sebagai BUMN yang tidak tahu dikarenakan mereka tidak mengetahui adanya aturan mengenai kewajiban adanya ruang laktasi di BUMN mereka. Meskipun ada BUMN yang tidak mengetahui akan adanya aturan ini, namun di BUMN-nya terdapat ruang laktasi. Ketika diberi pertanyaan mengenai alasan diadakannya ruang laktasi tersebut, pemimpin BUMN ini menjawab dikarenakan pemimpin menerima usulan dari karyawan untuk diadakannya ruang laktasi. Kebetulan, di kantor tersebut dalam setahun lebih dari 3 orang karyawan wanitanya yang melahirkan, jadi tingkat kebutuhan akan ruang laktasi di kantor tersebut cukup tinggi. Hal ini yang dijadikan alasan mengapa ruang laktasi ini disediakan di BUMN tersebut meskipun sebenarnya pemimpin BUMN tersebut tidak mengetahui akan adanya aturan mengenai kewajiban diadakannya ruang laktasi. Pemimpin BUMN ini juga menambahkan bahwa tidak

ditutupnya kemungkinan jika ruang laktasi ini tidak banyak yang menggunakan lagi maka ruangan ini akan dialihfungsikan menjadi ruang lain.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa mayoritas BUMN di wilayah Kota Semarang belum memiliki ruang laktasi sesuai dengan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013. Tingkat pengetahuan pemimpin instansi maupun orang yang ditunjuk dan tingkat kebutuhan wanita karir tidak mempengaruhi ada tidaknya ruang laktasi. Hal ini dilihat dari meskipun tingkat kebutuhan wanita karir akan adanya ruang laktasi dan tingkat pengetahuan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk mengenai PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 cukup tinggi namun masih tidak didapati ruang laktasi sesuai dengan peraturan. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian mengenai tingkat kepatuhan pemimpin BUMN atau orang yang ditunjuk yaitu masih rendah.

7.2. Saran

Tingkat adanya ruang laktasi di BUMN masih sangat rendah, oleh karena itu perlu adanya partisipasi dari segala pihak, tidak hanya dari BUMN itu sendiri tapi juga dari masyarakat dan juga pemerintah untuk mensukseskan pelaksanaan PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013. Masyarakat perlu mendukung tentang pelaksanaan program ASI eksklusif, baik secara aktif mensosialisasi, atau dengan mendukung sesama pihak dalam pemberian ASI eksklusif. Ditambah lagi masih banyak dijumpai pemimpin BUMN yang tidak mengetahui akan aturan ini, maka perlu adanya sosialisasi yang lebih dari pemerintah mengenai PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 sehingga tidak hanya pemimpin BUMN namun masyarakat juga bisa tahu bahwa salah satu hak mereka untuk mendapat fasilitas/ sarana ASI eksklusif bisa terjamin melalui PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013.

Selain itu, pemerintah juga harus memberikan sanksi tegas kepada BUMN yang tidak mentaati aturan yang ada. Karena, selama ini belum ada tindakan penertiban atau sanksi yang diberikan oleh pemerintah kepada BUMN yang melanggar PP RI Nomor 33 Tahun 2012 dan PERMENKES RI Nomor 15 Tahun 2013 ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada dr. Gatot Suharto, SH, Sp.F, DFM, Mkes., dr. Dodik Pramono, M.Si.Med., dr. Achmad Zulfa Juniarto, Sp.And, M.Si.Med, Ph.D., dan dr. Santosa, Sp.F, MH yang telah membantu terselenggaranya penelitian ini dan memberi masukan dalam penulisan artikel, serta BUMN Kota Semarang yang telah bersedia menjadi subjek penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

1. Medicine net. Definition of Breast Milk. [internet] 2012; cited (20/11/2013//23.01) . Available from <http://www.medterms.com/script/main/art.asp?articlekey=38691>
2. World Health Organization. Breastfeeding – exclusive breastfeeding; [internet] cited (20/11/2013// 23.28). Available from http://www.who.int/elena/titles/exclusive_breastfeeding/en/
3. UNICEF. Asi Eksklusif di Indonesia; [internet] cited (20/11/2013//23.46). Available from http://www.unicef.org/indonesia/id/reallives_19398.html
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2013
6. Ade Lestari, Mira Trisyani dan Restuning Widiasih. Motivasi Ibu Bekerja Dalam Memberikan ASI Eksklusif di PT. Dewhirst Men's Wear Indonesia. [Disertasi] Bandung: Universitas Padjadjaran; 2012. Available from <http://jurnal.unpad.ac.id/ejournal/article/view/681/727>

7. Ninda Fithananti. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan Kinerja Bidan Puskesmas Dalam Pelaksanaan Program ASI Eksklusif. [Disertasi] Semarang; 2013.
Available from <http://eprints.undip.ac.id/38633/1/4535.pdf>
8. Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. “World Fit For Children”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro; 2012 .
Available from:
http://eprints.undip.ac.id/38423/2/2_prosiding_Artikel_1st.pdf
9. Kementrian Kesehatan RI. Kliping Berita Kesehatan, [internet] Jakarta: Indopos; edisi Rabu 15 Mei 2013 halaman 9. Available from:
http://kliping.depkes.go.id/file/18242_Tak%20Ada%20Ruang%20Laktasi,%20Ada%20Ibu%20Memompa%20ASI%20di%20Toilet.PDF
10. CDC U.S. departement of Health and Human Services.”*Breastfeeding interventio*”. [Internet] 2005.
Available from <http://www.cdc.gov/breastfeeding>
11. Cadwell, Karin.”Buku Saku Manajemen Laktasi (*Pocket Guide for Lactation*)”. Jakarta: EGC; 2011
12. Ikatan Dokter Anak Indonesia. Nilai Nutrisi Air Susu Ibu. [monograph online] 2013. Available from:
<http://idai.or.id/public-articles/klinik/asi/nilai-nutrisi-air-susu-ibu.html>
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2005
14. Sastroasmoro S. Dasar-dasar metodologi penelitian klinis. 3th ed. Jakarta: Sagung Seto; 2008.
15. Notoatmodjo S. Metodologi penelitian kesehatan. Jakarta: Rineka Cipta; 2010.